



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022



DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami Panjatkan Kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2022 dapat diselesaikan. Penyusunan LKjIP merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai media Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya berdasarkan rencana strategis yang sudah ditetapkan. LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur.

Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan serta mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sebagai salah satu prasyarat untuk turut serta menciptakan Pemerintah Provinsi Bali yang akuntabel.

Bali, 24 Pebruari 2023



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

DAFTAR ISI.....2

RINGKASAN EKSEKUTIF3

BAB I.....4

PENDAHULUAN.....4

1.1 Latar Belakang.....4

 1.1.1 Cascading5

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja6

 1.2.1 Struktur Organisasi.....7

 1.2.2 Sumber Daya Manusia8

 1.2.3 Sarana dan Prasarana9

1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama9

 1.3.1 Permasalahan Utama..... 10

1.4 Landasan Hukum.....11

1.5 Sistematika Penulisan11

BAB II 13

PERENCANAAN KINERJA 13

2.1 Rencana Strategis..... 13

2.2 Perencanaan Kinerja 15

 2.2.1 Rencana Anggaran Tahun 2022..... 16

 2.2.2 Instrumen Pendukung..... 16

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 18

BAB III.....24

AKUNTABILITAS KINERJA.....24

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022.....24

3.2 Analisis Capaian Kinerja24

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2022.....34

BAB IV37

PENUTUP.....37

4.1 Kesimpulan37

4.2 Langkah-Langkah Kedepan..... 37



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali ke depan yaitu :

1. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pengelola yang menyebabkan Koperasi tidak mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya;
2. Rendahnya pertumbuhan Koperasi dan UKM sebagai akibat dari rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat Bali yang masih beranggapan lebih baik mencari kerja daripada menciptakan lapangan pekerjaan;
3. Kurangnya Koperasi dan UKM yang mendapat akses permodalan yang menyebabkan kesulitan dalam pengembangan usaha;
4. Terbatasnya pemasaran produk dan kemitraan Koperasi dan UKM sehingga peluang pengembangan usaha dan inovasi produk menjadi kecil yang mengakibatkan koperasi dan UKM jalan ditempat.

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran yang telah disusun dalam LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tahun 2022, kinerja Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali termasuk kategori sangat baik



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “*good governance*” (kepemerintahan yang baik). Agar “*good governance*” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, *private sector* dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya “*alignment*” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

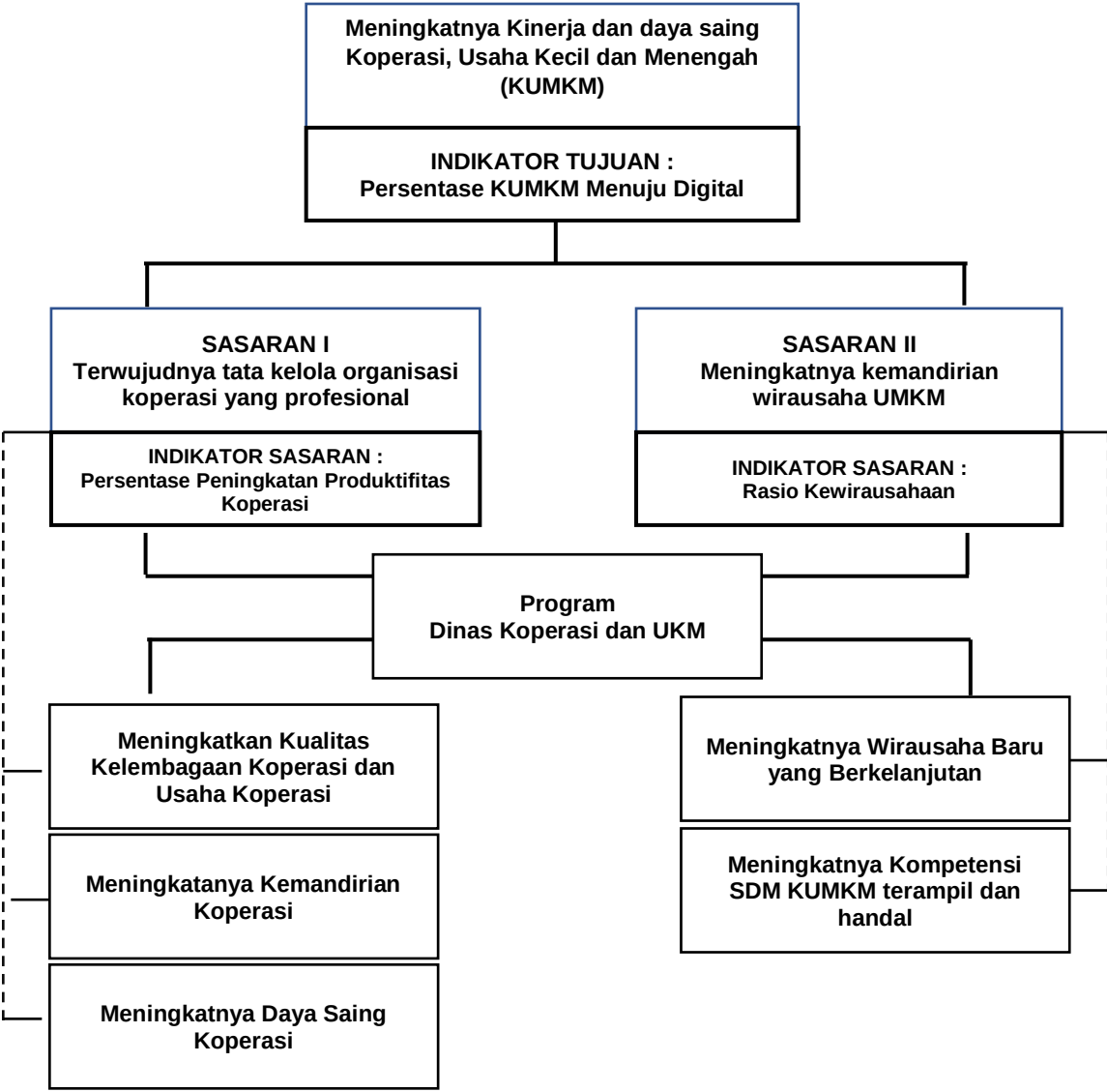
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2022 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2. Mendorong Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan kinerjanya



1.1.1 Cascading

Selaras dengan paradigma Performance Based Organization (organisasi berbasis kinerja), maka setiap perangkat daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan. Cascading Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali merupakan bentuk keseriusan dalam upaya peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2022. Sehingga kedepannya dalam melaksanakan program dan kegiatan harus berdasarkan kinerja yang berorientasi kepada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan bagi kesejahteraan sumber daya aparatur.



Gambar 1.1 Cascading Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. bali



1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mempunyai tugas pokok yaitu :

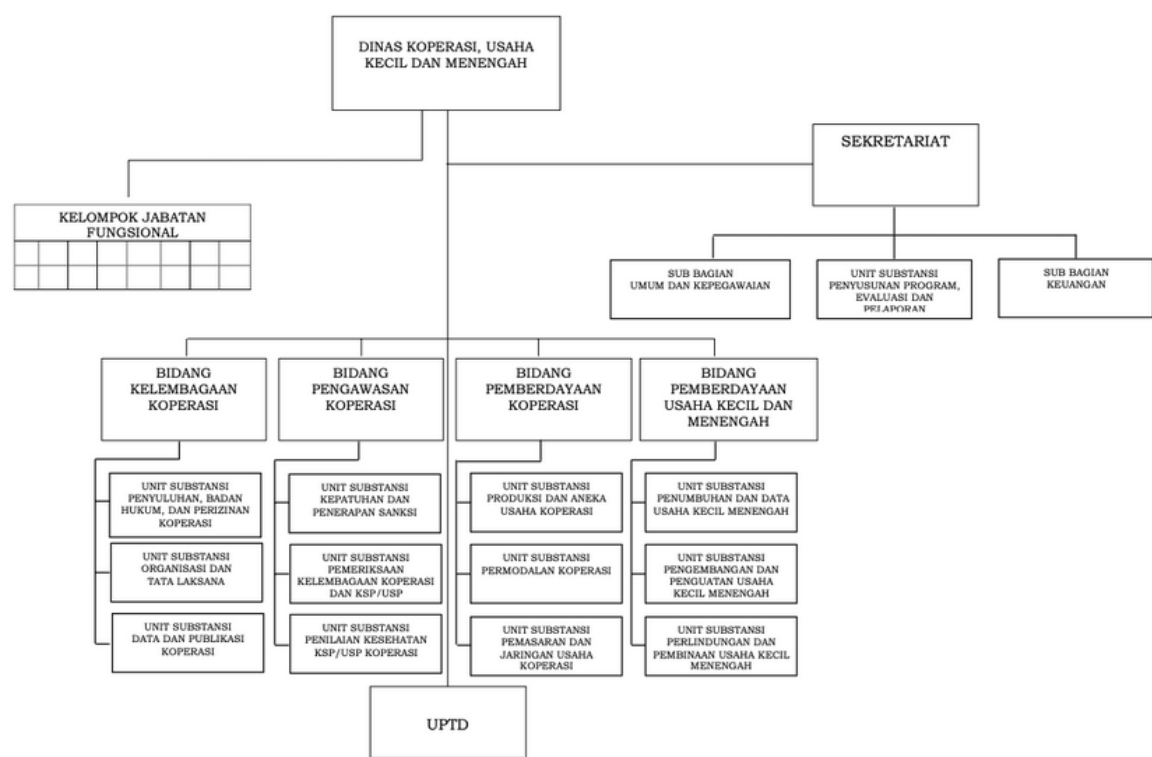
Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Provinsi
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi.
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.



1.2.1 Struktur Organisasi



Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, terdiri atas:

Kepala Dinas;

Sekretariat, membawahi:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahi:

- a. Unit Substansi Penyuluhan, Badan Hukum, dan Perizinan Koperasi;
- b. Unit Substansi Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Unit Substansi Data dan Publikasi Koperasi.

Bidang Pengawasan Koperasi, membawahi:

- a. Unit Substansi Kepatuhan dan Penerapan Sanksi;
- b. Unit Substansi Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi dan KSP/USP; dan
- c. Unit Substansi Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.

Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi:



- a. Unit Substansi Produksi dan Aneka Usaha Koperasi;
- b. Unit Substansi Permodalan Koperasi; dan
- c. Unit Substansi Pemasaran dan Jaringan Usaha Koperasi.

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi:

- a. Unit Substansi Penumbuhan dan Data Usaha Kecil Menengah;
- b. Unit Substansi Pengembangan dan Penguatan Usaha Kecil Menengah; dan
- c. Unit Substansi Perlindungan dan Pembinaan Usaha Kecil Menengah.

UPTD; dan Jabatan Fungsional.

1.2.2 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menunjang pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, maka harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. SDM memegang peranan yang sangat penting bagi kesuksesan suatu organisasi. Berikut ini jumlah pegawai, pangkat dan golongan , jumlah pejabat struktural dan fungsional per Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan jenjang pendidikan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai (orang)
1.	Golongan IV	16
2.	Golongan III	45
3.	Golongan II	7
4.	Golongan I	1
	Jumlah :	69

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai (orang)
1.	Doktor (S3)	1
2.	Pasca Sarjana (S2)	16
3.	Sarjana (S1)	39
4.	Diploma (D3)	2
5.	SLTA	10
6.	SLTP	0
7.	SD	1
	Jumlah :	69

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali (2022)



1.2.3 Sarana dan Prasarana

NO	GOLONGAN	TOTAL		KETERANGAN
		JUMLAH	SATUAN	
1	Tanah	6.345	M ²	Sudah diserahkan
2	Bangunan Gedung	4	Unit	Kondisi Baik
3	Kendaraan Operasional Roda 4	10	Unit	Kondisi Baik
4	Kendaraan Operasional Roda 2	14	Unit	Kondisi Baik
5	Meja Kerja	231	Unit	Kondisi Baik
6	Kursi Kerja	229	Unit	Kondisi Baik
7	Komputer	31	Unit	Kondisi Baik
8	Printer	24	Unit	Kondisi Baik
9	Filling Cabinet	29	Unit	Kondisi Baik
10	Rak Kaca/Kayu	23	Unit	Kondisi Baik
11	Lemari Besi/Kayu	24	Unit	Kondisi Baik
12	AC	69	Unit	Kondisi Baik
13	Zice	9	Unit	Kondisi Baik
14	Kursi Tamu	12	Unit	Kondisi Baik
15	Alat Kantor Lainnya	3	Unit	Kondisi Baik

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali (2022)

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali menjalankan kebijakan pembangunan Koperasi dan UMKM pada tataran menengah mencakup peningkatan sistem pendukung usaha yang mencakup lembaga atau sistem yang menyediakan dukungan bagi peningkatan akses Koperasi dan UMKM ke sumber daya produktif dalam rangka perluasan usaha dan perbaikan kinerja. Sumber daya produktif mencakup bahan baku, modal, tenaga kerja terampil, informasi dan teknologi. Perluasan usaha mencakup peningkatan tata laksana kelembagaan,



peningkatan kapasitas dan perluasan jangkauan pasar. Sementara itu kebijakan pembangunan koperasi dan UMKM pada tataran makro mencakup peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM serta perbaikan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari aspek kewirausahaan, maupun kemampuan teknis, manajemen dan pemasaran.

Ketahanan ekonomi sangat ditentukan oleh kekokohan dan kemandirian sektor Koperasi, dan UMKM. Untuk itu upaya pemberdayaan dan pengembangan kemampuan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Bali harus terus dilaksanakan melalui pembangunan Koperasi dan UMKM yang dilaksanakan melalui berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup upaya-upaya peningkatan kapasitas dan kinerja usaha Koperasi dan UMKM, penguatan dan perluasan peran sistem pendukung usaha, dan peningkatan dukungan iklim usaha, kebijakan pembangunan Koperasi dan UMKM mencakup perbaikan lingkungan usaha yang diperlukan untuk mendukung perkembangan Koperasi dan UMKM, untuk menjadikan Koperasi dan UMKM mampu menjadi Soko Guru Perekonomian Daerah, penggerak perjuangan Ekonomi Rakyat, dan menjadi sarana untuk mengatasi masalah-masalah pokok pembangunan, khususnya mengatasi masalah pengangguran, dan kemiskinan serta menjadi ketahanan ekonomi daerah.

1.3.1 Permasalahan Utama

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, antara lain sebagai berikut:

1. Masih rendahnya daya saing dan produktifitas koperasi dan UMKM di Bali
2. Rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi
3. Belum optimalnya data yang lengkap dan valid mengenai perkembangan KUMKM sehingga menyulitkan pemetaan dan pembinaan dalam peningkatan kelas usaha koperasi dan UMKM
4. Masih terbatasnya akses koperasi dan UKM dalam pembiayaan dan permodalan.
5. masih kurangnya kerjasama kemitraan ekonomi dan bisnis yang melibatkan KUMKM di Bali.



1.4 Landasan Hukum

1. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
2. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Satuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pedoman Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Provinsi Bali No 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
8. Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tahun 2018-2023.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali selama tahun 2022, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan menjelaskan tentang Latar Belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Aspek Strategis dan Permasalahan Utama, Landasan Hukum, Sistematika Penulisan;

Bab II Perencanaan menjelaskan tentang Rencana Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja 2022



Bab III Akuntabilitas Kinerja menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran.

Bab IV Penutup menjelaskan Kesimpulan, Rekomendasi untuk peningkatan kinerja di masa datang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis



VISION
VISI : NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI
melalui POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA
menuju **BALI ERA BARU**

MISI 17

MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS BUDAYA (BRANDING BALI) UNTUK MEMPERKUAT PEREKONOMIAN KRAMA BALI

TUJUAN

BERKEMBANGNYA PEREKONOMIAN BERBASIS BUDAYA BALI

**INDIKATOR :
PERSENTASE KUMKM MENUJU DIGITAL**

SASARAN

MENINGKATNYA PUSAT-PUSAT PEREKONOMIAN KECIL DAN MENENGAH KRAMA BALI

**INDIKATOR :
JUMLAH PUSAT-PUSAT PEREKONOMIAN LOKAL BERBASIS KOPERASI**

Tujuan dan sasaran yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tidak terlepas dari visi, misi Pemerintah Republik Indonesia, Nawa Cita Presiden Republik Indonesia, cita-cita dan acuan pengelolaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, visi misi Gubernur Provinsi Bali beserta program-program yang dijanjikannya selama 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan pengelolaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) adalah meningkatkan kinerja dan daya saing Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar dalam rangka kemandirian perekonomian daerah dengan indikator Persentase KUMKM Menuju Digital.

Berdasarkan tujuan di atas, dikembangkanlah 2 (dua) sasaran beserta indikator yaitu:

- a. Sasaran 1 : Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Profesional
Indikator : Persentase Peningkatan Produktivitas Koperasi
- b. Sasaran 2 : Meningkatnya Kemandirian Wirausaha UMKM
Indikator : Rasio Kewirausahaan.



Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Berdasarkan Indikator Kinerja Urusan pada tahun 2021 sebelum penyempurnaan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		TARGET KINERJA PADA TAHUN				
	URAIAN	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Kinerja dan Daya Saing Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)	Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja Koperasi yang profesional dan akuntabel	Persentase peningkatan produktivitas koperasi	-	5,70%	6,27%	6,85%	7,50%
		Jumlah Pengelola KUMKM yang Berkompeten dan Bersertifikasi	-	-	50 KUMKM	-	-
	Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	Rasio Kewirausahaan	-	7,71%	8,38%	9,56%	9,57%

Catatan : Indikator Jumlah Pengelola KUMKM yang Berkompeten dan Bersertifikasi untuk tahun 2022-2023 akan dihilangkan dikarenakan indikator bersifat mikro dan lebih cocok menjadi indikator program dibandingkan untuk menjadi indikator sasaran Dinas

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Berdasarkan Indikator Kinerja Urusan tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kinerja dan Daya Saing Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	Persentase KUMKM Menuju Digital	-	-	-	25,25%	26,50%



		Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja Koperasi yang profesional dan akuntabel	Persentase peningkatan produktivitas koperasi	-	5,70%	6,27%	6,85%	7,50%
		Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	Rasio Kewirausahaan	-	7,71%	8,38%	9,56%	9,57%

2.2 Perencanaan Kinerja

Dalam Bab ini menjelaskan tentang tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Tabel 2.3
Perencanaan Kinerja Tahun 2022

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kinerja dan Daya Saing Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	Persentase KUMKM Menuju Digital	Persentase	25,25%
		Terwujudnya Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional dan Akuntabel	Persentase Peningkatan Produktivitas Koperasi	Persentase	6,85%
		Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	Rasio kewirausahaan	Persentase	9.56%



2.2.1 Rencana Anggaran Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 23.344.418.533 Dengan rincian : Belanja Pegawai Rp. 12.651.322.541, Belanja Barang dan Jasa Rp. 10.505.595.922, Belanja Subsidi Rp. 37.500.00 dan Belanja Hibah Rp. 150.000.000

Tabel 2.4
Target belanja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
Tahun 2022 Sebelum dan Sesudah Pergeseran Anggaran

NO	URAIAN	AWAL	PERGESERAN
		TOTAL (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Alokasi anggaran Tahun 2022	22.441.608.190,00	23.344.418.533,00
2	Belanja Pegawai	14.255.730.998,00	12.651.322.541,00
3	Belanja Barang dan Jasa	7.998.377.192,00	10.505.592.992,00
4	Belanja Subsidi	37.500.000,00	37.500.000,00
5	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00

2.2.2 Instrumen Pendukung

1. Website Dinas

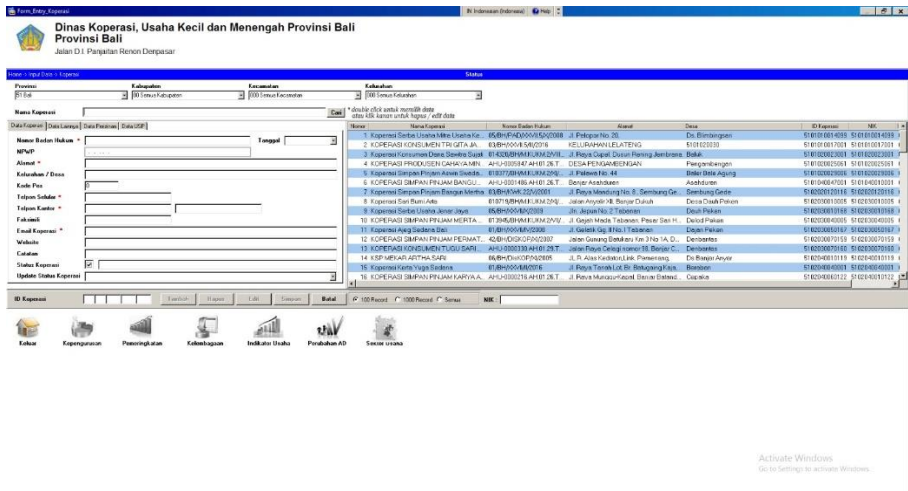
Instrument pendukung sistem informasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali pada tahun 2022 telah dilengkapi dengan adanya Website Dinas. Dengan adanya Website tersebut diharapkan dapat menjadi media penyampaian informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat umumnya dan masyarakat Koperasi dan UMKM pada khususnya dapat mengetahui Keberadaan dan Tugas Fungsi Dinas dalam Pengembangan Sektor Koperasi dan UMKM, serta dapat mengetahui program dan kegiatan apa saja yang telah dan akan dilaksanakan Dinas.





2. Online Data Koperasi

Untuk mendukung penerapan SAKIP Dinas Koperasi dan UKM menggunakan Online Data Koperasi. Online Data Koperasi merupakan Aplikasi yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali yang berkerja sama dengan Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Bali. Online Data Koperasi adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola dataKoperasi. Aplikasi ODS juga mengelola proses Sistem pendataan yang dilakukan adalah mengkompilasi data Koperasi yang diperoleh dari kabupaten/kota.



2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali pada Tahun 2022 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Bali guna mewujudkan target kinerja sesuai dengan tabel dibawah ini.



Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kinerja dan Daya Saing Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	Persentase KUMKM Menuju Digital	Persentase	25,25%
		Terwujudnya Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional dan Akuntabel	Persentase Peningkatan Produktivitas Koperasi	Persentase	6,85%
		Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	Rasio kewirausahaan	Persentase	9.56%

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2022 telah melaksanakan 6 (enam) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan yang didukung oleh dana sebesar Rp23.344.418.533,00 (Dua puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).

Tabel 2.6
Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Anggaran

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Target
A	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang bankable	255.064.240,00	83,33
1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	17.956.000,00	71 KSP/USP
a	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam	17.956.000,00	71 KSP/USP



	Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
2	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi simpan pinjam yang membuka kantor cabang pembantu atau kantor KAS	237.108.240,00	5 Kop.
a	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha pembukaan kantor cabang	237.108.240,00	5 Kop.
B	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat dan berkualitas	118.552.896	78,89
1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang dinilai kesehatannya</i>	118.552.896	142 KSP/USP Koperasi
a	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang dinilai kesehatannya	118.552.896	100 KSP/USP Koperasi
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi/Koperasi Tenun/Koperasi Subak yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN/BUMD/Swasta	468.864.290	3,08



1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Nivo Koperasi yang didampingi	468.864.290	126 Kop.
a	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi nivo provinsi yang difasilitasi permodalan Jumlah koperasi nivo provinsi yang difasilitasi temu mitra	315.246.554	60 Kop
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi nivo provinsi yang baik kelembagaan dan meningkat aset dan omsetnya	153.617.736	66 Kop
D	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat	5.823.253.216	0,25
1	<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah pengelola Koperasi dan UMKM yang diberikan pelatihan</i>	5.823.253.216	50 Orang
a	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta diklat yang memperoleh sertifikasi teknis dan sertifikat kompeten	5.823.253.216	50 Orang
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang bankable	1.137.543.380	0,12
1	<i>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan</i>	<i>Jumlah UMKM yang memiliki ijin usaha dan terdata secara valid</i>	1.137.543.380	190 UMKM



	Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan			
a	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah peningkatan kelas UMKM	1.137.543.380	190 UMKM
F	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	15.058.868.555,00	83,5
1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	80.630.016	3 Dok
a	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	78.417.006,00	2 Dok
b	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen capaian kinerja PD	2.213.010,00	1 Dok
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	12.586.926.541,00	1 layanan
a	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	12.586.926.541,00	14 Dok.
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	96.895.770	6 Layanan
a	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	9.999.250	1 Layanan
b	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	64.931.520	1 Layanan



c	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	14.965.000	1 Layanan
d	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	7.000.000	1 Layanan
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1.335.111.200,00	3 Layanan
a	Penyediaan jasa surat-menyurat	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	2.000.000,00	1 Layanan
b	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	271.200.000,00	1 Layanan
c	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1.061.911.200,00	1 Layanan
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	959.305.028,00	3 Jenis
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	729.460.536,00	2 Jenis
b	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara	50.000.000,00	2 Jenis
c	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	179.844.492,00	2 Unit



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
a.	Sangat Baik	$\geq 91\%$
b.	Baik	76 – 90,99%
c.	Cukup	66 – 75,99%
d.	Kurang	51 – 65,99%
e.	Sangat Kurang	$\leq$

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :



1. Tabel 3.2 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

Tujuan/Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Tahun Berjalan			Kategori	Sumber Data
		Target	Realisasi	Capaian %		
1		4	5	6	7	8
1 Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	Persentase KUMKM Menuju Digital	25,25%	25,64%	101%	Sangat Baik	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Bali
a Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang profesional dan akuntabel	Persentase peningkatan produktivitas koperasi	6,85%	6,44%	94%	Sangat Baik	Bidang Kelembagaan Koperasi
b Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	Rasio Kewirausahaan	9,56%	9,99%	104%	Sangat Baik	Bidang Pemberdayaan UKM dan BPS

Pada tabel diatas dapat diketahui pencapaian target dari Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dengan kategori **Sangat Baik**. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2022 sudah sangat baik.

Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali dengan indikator “Persentase KUMKM Menuju Digital”, target tahun 2022 adalah 22,25% dan Realisasinya 25,64% dengan kategori **Sangat Baik**. Dapat dijelaskan tujuan digitalisasi KUMKM adalah upaya untuk mengubah cara kerja manajemen koperasi pada umumnya menjadi manajemen koperasi secara digital, hal ini akan mempermudah koperasi dalam menjalankan bisnisnya, dan juga dalam memberikan pelayanan bagi seluruh anggotanya melalui Aplikasi Koperasi Digital dan bagi UMKM adanya digitalisasi koperasi akan mempermudah para UMKM untuk mencari tambahan modal dalam pengembangan usahanya, digitalisasi koperasi memberikan kemudahan serta kenyamanan dalam pengajuan pinjaman modal tanpa harus berurusan dengan bank yang biasanya memiliki bunga yang tinggi.

Selain itu, adanya digitalisasi koperasi akan membuat transparansi penyaluran dana serta catatan mengenai keanggotaan lebih mudah dan jauh lebih aman untuk diakses, pelayanan yang diberikan koperasi kepada para anggotanya pun jauh lebih mudah dengan adanya digitalisasi koperasi. Serta adanya digitalisasi koperasi akan memudahkan dalam menghubungkan antara pelaku UMKM dengan pembelinya melalui aplikasi berbasis digitalisasi, yang mana dengan adanya hal tersebut para pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas ekonominya dan produksinya. Peran Dinas



Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam digitalisasi Koperasi dan UMKM adalah membentuk ekosistem Koperasi dan UMKM yang Berkualitas dan sehat dalam menjangkau kegiatan dan usahanya dengan Cara baru dan Manajemen Tata Kelola Koperasi yang Baik (Good Corporate Governance) Serta Memiliki Daya Saing dan Adaptif terhadap Perkembangan Zaman.

Realisasi indikator sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali 2022 “Persentase peningkatan produktivitas koperasi” adalah 6,44% dari target sebesar 6,85% dengan persentase pencapaian sasaran strategis adalah sebesar 94%. Peningkatan produktivitas koperasi adalah upaya yang ditujukan untuk memberikan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antar pelaku usaha. Melalui pembinaan dan pengembangan sektor koperasi diharapkan upaya peningkatan usaha ekonomi produktif akan lebih efisien dan dapat mencapai target yang telah ditentukan. capaian ini bisa diwujudkan dengan melakukan aktivitas melaksanakan temu konsultasi dengan lembaga keuangan Bank dan Non Bank, sosialisasi dan pemanfaatan KUR dan skim-skim kredit lainnya. Namun dampak pandemi Covid-19 masih terasa sampai dengan saat ini, dimana berkurangnya SHU dan Modal koperasi yang disebabkan penurunan tingkat perekonomian peserta sehingga transaksi-transaksi menjadi macet serta banyak peminjam baru dapat mengembalikan pijamannya sehingga Koperasi mengalami penurunan modal usahanya.

Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri dengan indikator “Rasio Kewirausahaan”, target tahun 2022 adalah 9,56 dengan realisasi 9,99 dengan kategori **Sangat Baik**. Upaya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam meningkatkan Rasio wirausaha sehingga usaha UMKM dapat berkembang dan berkelanjutan adalah :

1. Transformasi pertumbuhan wirausaha produktif dengan membina setiap orang yang memiliki jiwa dan menjalankan kewirausahaan untuk menciptakan ekosistem dan mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan dalam membentuk struktur usaha yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
2. Transformasi digital dan pemanfaatan teknologi dalam menjalankan aktivitas usahanya dengan masuk ke dalam ekosistem digital seperti market place, e-commerce atau platform digital lainnya.



- Transformasi usaha informal ke formal dengan memfasilitasi UMKM untuk memperoleh izin usaha yang lengkap, memiliki sertifikasi dan standardisasi usaha, dan dapat mengakses pembiayaan formal.

2. Tabel 3.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

N O	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2020			2021			2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	Persentase KUMKM Menuju Digital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25,25	25,64	101%
a	Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel	Persentase peningkatan produktivitas koperasi	5,57	8,35	146%	6,27	9,17	146%	6,85	6,44	94%
b	Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	Rasio Kewirausahaan	N/A	N/A	N/A	8,38	9,55	113%	9,56	9,99	104%

Pada tabel diatas adalah perbandingan capaian pada 3 (tiga) tahun terakhir pada level tujuan dan sasaran atau Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali pada tahun 2022. Jika dilihat dari realisasi dan capaiannya sudah sangat memenuhi target yang telah ditetapkan atau dengan kategori **Sangat Baik**. Data-data yang kosong merupakan bentuk penyesuaian indikator hasil review SAKIP, sehingga banyak terjadi ketidaksesuaian indikator kinerja pertahunnya.

Adapun hal-hal yang mendukung keberhasilan pada setiap indikator tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut :

- Digitalisasi KUMKM dapat dicapai dikarenakan adanya, pendampingan tata kelola koperasi yang modern dan professional, fasilitasi akses pasar dan kemitraan dengan berbagai stakeholder yang relevan (off taker/buyer), dan fasilitasi sarana promosi dan kemitraan bagi UKM melalui pameran dan digitalisasi.



- b. Peningkatan Produktivitas Koperasi dapat dicapai dikarenakan adanya, Penguatan Literasi Keuangan melalui Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi, Pembentukan Koperasi Produksi, Pendampingan dan Pemberdayaan Koperasi serta Program Penguatan Kelembagaan (Koperasi) dan Permodalan Usaha dalam Kelompok Bersama Satupintu (KBS) yang di gagas Gubernur Bali.
- c. Rasio Kewirausahaan meningkat dikarenakan adanya, pengembangan kewirausahaan melalui dunia pendidikan, peningkatan kapasitas lembaga incubator, perluasan akses pembiayaan bagi wirausaha dan startup, dan penyelenggaraan pendampingan dan konsultasi bisnis melalui PLUT KUMKM.

3. Tabel 3.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET AKHIR 2023	CAPAIAN	Tingkat Kemajuan
1	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	Persentase KUMKM Menuju Digital	25,64	26,50	96,75	Akan Tercapai
a	Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel	Persentase peningkatan produktivitas koperasi	6,44	7,50	85,87	Akan Tercapai
b	Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	Rasio Kewirausahaan	9,99	9,57	104,18	Sudah Melebihi Target Akhir RENSTRA

Dari tabel diatas dapat diketahui perbandingan capaian IKU tahun 2022 dengan Target Akhir RENSTRA Tahun 2023



4. Tabel 3.5 Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan dan peningkatan atau penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan pada Tahun 2022

N O	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Analisis Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	Persentase KUMKM Menuju Digital	25,25	25,64	101	Digitalisasi KUMKM dapat dicapai dikarenakan adanya, pendampingan tata kelola koperasi yang modern dan professional dan fasilitasi sarana promosi dan kemitraan bagi UKM melalui pameran dan digitalisasi	-
a	Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel	Persentase peningkatan produktivitas koperasi	6,85	6,44	94,01	Peningkatan Produktifitas Koperasi dapat dicapai dikarenakan adanya, Penguatan Literasi Keuangan melalui Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi dan Program Penguatan Kelembagaan (Koperasi) dan Permodalan Usaha dalam Kelompok Bersama Satupintu (KBS) yang di gagas Gubernur Bali	Untuk lebih meningkatkan produktifitas koperasi, perlu difokuskan untuk mensejahterakan anggota koperasinya, yang dapat dilakukan dengan pemberian pelatihan kewirausahaan dan pemberdayaan anggota koperasi yang bergerak di sektor UMKM maupun industri
b	Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	Rasio Kewirausahaan	9,56	9,98	104,29	Rasio Kewirausahaan meningkat dikarenakan adanya, pengembangan kewirausahaan melalui dunia pendidikan, peningkatan kapasitas lembaga incubator, perluasan akses pembiayaan bagi wirausaha dan startup, dan penyelenggaraan pendampingan dan konsultasi bisnis melalui PLUT KUMKM	-



5. Tabel 3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

N O	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	
1	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	Persentase KUMKM Menuju Digital	25,25	25,64	101	23.344.418.533	22.321.546.376	95,62	4,38
2	Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel	Persentase peningkatan produktivitas koperasi	6,85	6,44	94,01	842.481.426	800.355.764	95,00	5,00
3	Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	Rasio Kewirausahaan	9,56	9,98	104,29	6.960.796.596	6.613.795.328	95,01	4,99

6. Tabel 3.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

N O	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	Persentase KUMKM Menuju Digital	101				
a	Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel	Persentase peningkatan produktivitas Koperasi	94,01	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang bankable	100	Menunjang
				Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	100	Menunjang
				Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam	100	Menunjang



				Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi simpan pinjam yang membuka kantor cabang pembantu atau kantor KAS	100	Menunjang
				Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha pembukaan kantor cabang	100	Menunjang
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat dan berkualitas	100	Menunjang
				Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang dinilai kesehatannya	100	Menunjang
				Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang dinilai kesehatannya	100	Menunjang
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi/Kopera si Tenun/Koperasi Subak yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN/BUMD/S wasta	76,95	Menunjang



				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Nivo Koperasi yang didampingi	100	Menunjang
				Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi nivo provinsi yang difasilitasi permodalan Jumlah koperasi nivo provinsi yang difasilitasi temu mitra	100	Menunjang
				Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi nivo provinsi yang baik kelembagaan dan meningkat aset dan omsetnya	100	Menunjang
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat	100	Menunjang
				<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah pengelola Koperasi dan UMKM yang diberikan pelatihan</i>	100	Menunjang
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta diklat yang memperoleh sertifikasi teknis dan sertifikat kompeten	100	Menunjang
b	Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	Rasio Kewirausahaan	104,29	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang bankable	100	Menunjang



				Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang memiliki ijin usaha dan terdata secara valid	100	Menunjang
				Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah peningkatan kelas UMKM	100	Menunjang

Pencapaian Tujuan dan indikator tujuan tentunya juga didukung oleh 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

a. Peningkatan Produktivitas Koperasi

Pasal 33 UUD 1945 menempatkan koperasi sebagai pilar dan tulang punggung perekonomian nasional. Agar berfungsi secara optimal sebagai pilar dan tulang punggung perekonomian, koperasi harus dikelola secara efisien dan produktif. Tingkat produktivitas koperasi, peningkatan efisiensi murni harus diprioritaskan, diikuti dengan peningkatan efisiensi skala dan efisiensi teknis. Koperasi harus memberikan pelatihan reguler untuk staf mereka, manajemen profesional, mengadopsi teknologi canggih, dan memperbesar ukurannya dengan menggabungkan koperasi kecil menjadi entitas yang lebih besar.

Capaian sasaran strategis kesatu pada tabel 3.7 dapat ditunjukkan pada tahun 2022 target 6,85 dengan realisasinya adalah 6,44 dan termasuk pada kategori Baik, jika dibandingkan dengan tahun 2021 realisasinya terjadi sedikit penurunan sebesar 2,73 atau sama dengan 40%. Indikator program (sesuai dengan RENSTRA 2018-2023) yang mendukung pada sasaran strategis kesatu adalah :



1. Persentase Koperasi yang Bankable. Target kinerja ini di tahun 2022 adalah 83,33 dengan realisasi 100
 2. Persentase koperasi / koperasi tenun / koperasi subak yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta. Target kinerja ini di tahun 2022 adalah 3,08 dengan realisasi 2,37
 3. Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat dan berkualitas. Target kinerja ini di tahun 2022 adalah 79 dengan realisasi 82
- b. Rasio Kewirausahaan

Pengertian kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Kewirausahaan dan wirausaha sendiri merupakan sebuah upaya yang melibatkan sumber daya lainnya seperti sumber daya alam, modal dan teknologi, sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan kerja, penghasilan dan produk yang diperlukan masyarakat.

Capaian sasaran strategis kedua pada tabel 3.7 dapat ditunjukkan pada tahun 2022 target 9,56 dengan realisasinya adalah 9,98 dan termasuk pada kategori Baik, jika dibandingkan dengan tahun 2021. Indikator program (sesuai dengan RENSTRA 2018-2023) yang mendukung pada sasaran strategis kedua adalah :

1. Persentase pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat. Target kinerja ini di tahun 2022 adalah 0,25 dengan realisasi 3,37
2. Persentase UMKM yang bankable. Target kinerja ini di tahun 2022 adalah 0,12 dengan realisasi 1,20

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali pada tahun anggaran 2022, di dukung dengan Anggaran Perubahan sebesar Rp. 23.344.418.533,- dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
A	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	255.064.240,00	239.330.844,00	93,83
1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	17.956.000,00	16.111.052,00	89,72
2	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	237.108.240,00	223.219.792,00	94,14
B	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	118.552.896	118.314.446	99,80
1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	118.552.896	118.314.446	99,80
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	468.864.290	442.710.474	94,42
1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	468.864.290	442.710.474	94,42
D	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	5.823.253.216	5.500.456.370	94,46
1	<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	5.823.253.216	5.500.456.370	94,46
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.137.543.380	1.113.338.958	97,87
1	<i>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	1.137.543.380	1.113.338.958	97,87
F	Program Penunjang Urusan Pemerintah	15.058.868.555,00	14.463.273.014,00	96,04



1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	80.630.016	80.033.676	99,26
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.586.926.541,00	12.215.344.802,00	97,05
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.895.770	85.069.060	87,79
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	1.335.111.200,00	1.229.595.356,00	92,10
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	959.305.028,00	853.230.120,00	88,94

Realisasi anggaran pada tahun 2022 pada 6 program tersebut diatas hampir memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan. Dapat dikatakan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sudah BAIK.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagaijabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (Dua) sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 2 (Dua) indikator.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

Hasil Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana dan dukungan para stakeholder Koperasi, UKM.
2. Dari analisis 2 (dua) sasaran, terdapat 2 (dua) indikator sasaran seluruhnya merupakan indikator kinerja utama sebagai tolak ukur. Pada tahun 2022 semua indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan.

4.2 Langkang-Langkah Kedepan

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan LKjIP dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan kinerja sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti leadership, sumberdaya manusia yang berkompetensi, manajemen, sarana prasarana dan fungsi pengawasan. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan



kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.

2. Pemanfaat teknologi informasi dalam memberikan penyuluhan, pendataan, aktivasi koperasi tidak aktif, serta pendampingan izin usaha.
3. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK).
4. Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali disamping faktor-faktor tersebut di atas kedepannya wajib mempertimbangkan perencanaan kegiatan yang lebih berkualitas, sinergitas pembangunan dibidang koperasi dan UMKM dengan Dinas Kabupaten/Kota serta dukungan anggaran dari APBD yang proposional.

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2022 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

